

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
Daerah Di Kota Yogyakarta 2001-20015**

SKRIPSI



2018

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota

Yogyakarta 2001-2015

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi,

Pada fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Maskur

NomorMahasiswa : 13313088

Jurusan : Ilmu Ekonomi



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sunggu, tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Desember 2018

Penulis,



Maskur

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزَاتِكُمْ يَا رَبَّنَا

PENGESAHAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta
2001-2015

Nama : Maskur

Nomor mahasiswa : 13313088

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 26 Desember 2018

Telah di Setujui dan di sahkan oleh

Dosen pembimbing


Diana Wijayanti, S.E., M.Si

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI
YOGYAKARTA 2001-2015**

Disusun Oleh : **MASKUR**

Nomor Mahasiswa : **13313088**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 15 Januari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Diana Wijayanti, Dra., M.Si.**

Penguji : **Suharto, SE., M.Si.**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Satriana, SE., M.Si, Ph.D.

Motto

- ✓ Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermamfaat Bagi Orang Lain
- ✓ Allah tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Kesanggupannya” Qs
Al-Baqarah ayat 286,
- ✓ Sekali Layar Berkembang Surut Kita Berpantang(SAPMAPPUII)
- ✓ Buatlah Orang lain ”Tersenyum” dengan Keberadaanmu di Manapun
Engkau Berada



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya selesaikan dan saya persembahkan

Untuk kedua orang tua saya bapak Razali Karim dan Ibu Yusma

Untuk kakak kandung saya Ahmadi,kana Yuliana,Rivi Serlina dan Desi restiani

Untuk keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan segala urusan perkuliahan selama ini.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillahirrabil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta”** dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Informasi yang disajikan dalam skripsi ini telah diusahakan sedemikian baik supaya pembaca dapat memahami isi dari skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, baik kemampuan, wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang sangat berarti sehingga kesulitan yang ada dalam proses penyusunan skripsi ini dapat diatasi dengan baik. Melalui kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai

pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan ucapan ini dihaturkan kepada:

1. Allah S.W.T atas segala nikmat dan karunia-Nya dan tidak henti-hentinya memberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalani hidup ini.
2. Bapak **Jaka Sriyana, SE., M.Si., PH.D.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Diana Wijayanti, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Semua Dosen yang telah menyampaikan ilmunya kepada penulis selama ini, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis.
5. Segenap Staff dan Karyawan FE UII atas segala bantuannya bagi penulis dalam proses menuntut ilmu.
6. Kedua Orang Tua tercinta dan keluarga yang telah memberikan dukungan, semangat serta doa yang tak ada henti-hentinya.
7. Kepada teman-teman dan saudara seperjuangan Keluarga besar ilmu ekonomi 2013 UII.
8. Kepada Keluarga “MTR” terima kasih atas bantuan, doa dan semangatnya dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada Keluarga besar SAPMAPP UII
10. kepada Warga Kontrakan Batu

11. Kepada Keluarga Angkatan Sisa 13 Berkharisma

12. Kepada Keluarga PUBG gak nehh

13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini, tanpa dapat penulis sebut satu persatu. Semoga jasa dan amal baik semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak karenaskripsi ini masih jauh dari sempurna dan semoga dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi yang mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 26 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Daftar Tabel	xiv
Halaman Daftar Gambar	xiii
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
Halaman Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka	7
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Pajak	9
2.2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.2.2 Jenis Jenis Pajak.....	11
2.2.3 Fungsi Pajak.....	13
2.2.1 Pajak Daerah.....	13
2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	13
2.2.2.2 Ciri Ciri Pajak Daerah.....	13
2.2.2.3 Jenis Jenis Pajak Daerah Kabupen/kota	14
2.2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.2.4.2 Sumber Sumber Pendapatan asli daerah.....	18
2.2.5 Hubungan antar Variabel.....	21
2.2.5.1 Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Daerah...	21
2.2.5.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	21
2.2.5.3 Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	22

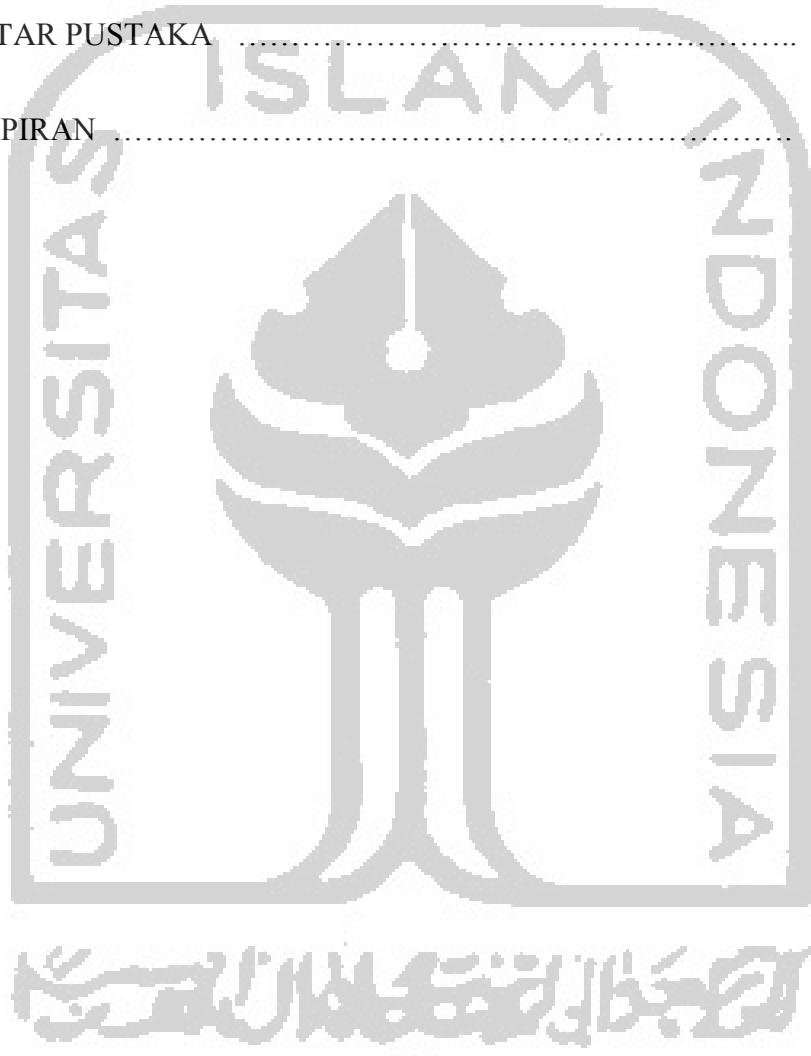
2.2.5.4 Pengaruh jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah...	23
2.3 Kerangka pemikiran.....	24
2.4 Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data	26
3.1.1 Jenis Data.....	26
3.1.2 Cara Pengumpulan Data.....	26
3.2 Variabel Yang Digunakan	26
3.2.1 Variabel Dependen	27
3.2.2 Variabel Independen	27
3.3 Metode Analisis	28
3.3.1 Uji MWD	29
3.3.2. Uji Asumsi Klasik	29
3.3.3 Uji Multikolinearitas	30
3.3.4 Uji Heteroskadisitas.....	30
3.3.5 Uji Autokorelasi.....	31
3.3.6 Koefisien Determinasi (R^2).....	33
3.3.7 Uji Hipotesis (Uji-F).....	34

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian	36
4.2 Pemilihan model Regresi	37
4.2.1 Model Linier.....	37
4.2.2 Model Log Linier.....	38
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	40
4.3.1 Uji Autokorelasi.....	40
4.3.2 Uji Multikorelasi	40
4.3.3 Uji Heterokedastisitas	41
4.4 Uji Statistik	42
4.4.1 Koefisien Determinasi	42
4.4.2 Uji f	42
4.4.3 Uji t	43
4.5 Analisa Ekonomi	44
4.5.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	44
4.5.2 Jumlah Penduduk	44
4.5.3 PDRB	45
4.5.4 Jumlah Industri	45

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pajak Daerah, Inflasi, Jumlah penduduk, PDRB, Jumlah industri Kota Yogyakarta tahun 2001-2015

.....	5
Tabel 4.1 Data Penelitian	50
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Uji MWD Model Linier	50
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Uji MWD Model Log Linier	51
Tabel 4.4 Hasil Regresi Setelah Uji MWD	52
Tabel 4.5 Hasil Autokorelasi	53
Tabel 4.6 Hasil Auto Multikolinieritas	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas	55
Tabel 4.8 Hasil Uji F	56
Tabel 4.9 Hasil Uji T	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Data Penelitian	68
LAMPIRAN II	: Hasil Uji MWD	69
LAMPIRAN III	: Hasil Regresi Linier Setelah Uji MWD.....	70
LAMPIRAN IV	; Hasil Estimasi Linier Berganda Model Linier....	71
LAMPIRAN V	: Uji Autokorelasi	72
LAMPIRAN VI	: Uji Multikolinieritas.....	72
LAMPIRAN VII	: Uji Heteroskedastisitas	73
LAMPIRAN VIII	: Uji F	74
LAMPIRAN IX	: Uji T	76



ABTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di kota Yogyakarta 2001-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB dan Jumlah Industri terhadap Pajak Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data antar waktu (*time series*) tahun 2001-2015 yang diperoleh dari sumber Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis kuantitatif yang digunakan yaitu uji MWD, uji asumsi klasik dan uji statistik dengan menggunakan alat pengolahan data Eviews 9. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta 2001-2015 secara signifikan dan memiliki hubungan negatif yaitu variable Inflasi. Variabel lainnya yaitu Jumlah Penduduk, PDRB dan Jumlah Industri mempengaruhi secara signifikan dengan hubungan positif terhadap Pajak Daerah di Kota Yogyakarta 2001-2015.

Kata kunci: Inflasi, jumlah penduduk, PDRB, jumlah industri,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga setiap daerah diwajibkan menyukseskan pembangunan daerah. Salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah ketersediaan anggaran daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting. PAD menunjukkan seberapa besar kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah, setiap daerah harus mampu menggali potensi sumber dana yang ada di daerahnya sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi daerahnya dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Undang-undang no 12 tahun 2008, menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus di hadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah pemerintah harus cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensi sebagai motor penggerak pembangunan daerah terutama melalui upaya pembangunan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Mahmudi (2010:16), menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Sesuai undang-undang no 34 tahun 2000 atas perubahan undang undang no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas , nyata dan bertanggung jawab . Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu di tingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud .

Kota Yogyakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang cukup strategis untuk pusat perekonomian . Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu tolak ukur pelaksanaan

otonomi daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya (Pesik,2013). Hal itu membuat pemerintah kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan penerimaan PAD dari segala sektor.

Pada tahun 2015, kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah sebesar 5,45 persen berasal dari pajak daerah. Penerimaan pajak daerah ini erat kaitannya dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat

Tabel 1.1
Perkembangan Pajak Daerah, Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB dan Jumlah Industri Kota Yogyakarta tahun 2001-2015

Tahun	Pajak Daerah (juta rupiah)	Inflasi (%)	Jumlah Penduduk (orang)	PDRB (juta rupiah)	Jumlah Industri (unit)
2001	2.288.637	12,56	404.741	3.648.631	5.788
2002	3.051.759	12,01	412.196	3.812.425	5.813
2003	3.352.651	5,73	392.239	3.922.390	5.785
2004	4.058.198	6,95	398.004	3.980.040	5.814
2005	4.610.672	14,98	435.236	4.399.902	5.854
2006	4.399.715	10,4	443.112	4.574.051	5.848
2007	5.478.320	7,99	451.118	4.776.401	5.862
2008	6.245.277	9,88	456.915	5.021.148	5.950
2009	7.185.254	2,93	462.752	5.224.851	6.224
2010	7.825.458	7,38	387.086	5.505.942	6.535
2011	12.045.752	3,38	390.554	5.816.568	6.565
2012	20.832.921	4,31	394.012	6.151.679	6.565
2013	22.774.885	6,81	402.679	6.498.900	6.516
2014	25.399.630	1,76	400.467	6.640.393	5.133
2015	30.406.767	0,96	412.704	6.983.870	5.409

Sumber: BPS (berbagai edisi)

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah setiap tahunnya meningkat. Besarnya penerimaan pajak daerah ini di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Inflasi, Jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah industri besar dan sedang yang ada di Kota Yogyakarta. Keempat

faktor tersebut selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai peramalan penerimaan pajak daerah.

Sebagai indikator perekonomian yang terkait dengan kondisi pasar, nilai inflasi berfluktuasi dengan pengaruh dari berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat, kondisi banyaknya barang yang beredar, dan sebagainya. Inflasi merupakan rata-rata kenaikan harga barang dan jasa secara umum terus menerus dalam persen. Dengan meningkatnya inflasi maka akan menaikkan tarif pajak pada barang atau jasa. yang bersangkutan Jumlah penduduk yang merupakan subjek pajak adalah syarat untuk melakukan pemungutan pajak, dimana penduduk adalah yang menikmati pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 sebesar 392.506 jiwa sedangkan tahun 2015 naik menjadi 412.704 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk tersebut merupakan penambahan alami melalui kelahiran, maupun penambahan penduduk akibat arus migrasi. Ketika jumlah penduduk naik, maka akan semakin banyak permintaan akan barang publik sehingga pemerintah akan terus mengoptimalkan untuk memberikan barang-barang publik tersebut tetapi dengan jasa timbal balik dari masyarakat yang berupa pungutan pajak yang bersangkutan

Jumlah penduduk yang merupakan subjek pajak adalah syarat untuk melakukan pemungutan pajak, dimana penduduk adalah yang menikmati pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 sebesar 392.506 jiwa sedangkan tahun 2015 naik menjadi 412.704 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk tersebut merupakan penambahan alami melalui kelahiran, maupun penambahan penduduk akibat arus migrasi. Ketika jumlah penduduk naik, maka akan semakin banyak permintaan akan barang publik sehingga pemerintah akan terus mengoptimalkan untuk

memberikan barang-barang publik tersebut tetapi dengan jasa timbal balik dari masyarakat yang berupa pungutan pajak yang bersifat memaksa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dengan meningkatnya PDRB maka akan secara langsung berakibat pada kenaikan sektor-sektor pembentuk PDRB yang artinya ketika sektor-sektor itu naik, maka akan ada kenaikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana Pengaruh jumlah Industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta

2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta
3. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah Industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti
 - a) Dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti tentang pajak daerah .
 - b) Dapat mengetahui faktor faktor apa saja yang menghambat dan mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
2. Manfaat bagi masyarakat
 - a) Agar masyarakat kota yogyakarta mempunyai kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar pajak .
 - b) Dan dapat mengetahui dana pajak dikelola untuk meningkatkan fasilitas umum dan pelayanan publik untuk masyarakat Kota Yogyakarta
3. Manfaat bagi pemerintah (pembuat kebijakan)
 - a) Diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta lebih bijak dan mempertimbangkan hal-hal dalam mengambil keputusan.
 - b) Agar pemerintah lebih meningkatkan fasilitas dan layanan publik untuk masyarakat Kota Yogyakarta.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Beberapa penelitian tentang Faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD diantaranya adalah Sutrisno (2002), penelitian yang mengkaji tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penerimaan pajak daerah (studi kasus di Kabupaten Semarang) dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan untuk menganalisis elastisitas masing-masing faktor pembentuk yang diamati terhadap penerimaan pajak daerah. Model yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Jumlah pelanggan listrik, jumlah penduduk, pendapatan perkapita, jumlah petugas pajak, dan jumlah wisatawan berpengaruh dominan terhadap penerimaan pajak daerah.
- b. Peningkatan jumlah pelanggan listrik Akan memberikan efek yang besar terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.
- c. Peningkatan pendapatan perkapita berpengaruh positif baik terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran maupun penerimaan pajak parkir.
- d. Peningkatan jumlah wisatawan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran.

Romikariyem (2005) mengadakan penelitian Tentang "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 1993-2004". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari penelitian ini diperoleh variabel PDRB

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0.0002 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga H_0 ditolak H_a diterima. Sedangkan nilai probabilitas untuk variabel inflasi sebesar 0,3185 sehingga H_0 diterima H_a ditolak, maka variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder dengan menggunakan *time series* dari tahun 1993-2004.

Tamara (2009), dalam penelitiannya mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah di Kota Bandung dari tahun 1999-2008. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda (*multiple regression*). Dengan model regresi berganda, maka hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk, PDRB, jumlah industri di Kota Bandung mempunyai pengaruh signifikan terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung.
- b. Tingkat inflasi di Kota Bandung tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah.
- c. Jumlah penduduk, inflasi, serta jumlah industri secara signifikan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di Kota Bandung.

Anggit Darmastuti Aji (2013) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah industri, daya listrik tersambung terhadap penerimaan pajak Daerah Kabupaten Wonogiri. Dari hasil penelitian ini diperoleh variabel jumlah wisatawan dan jumlah daya listrik tersambung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri, sedangkan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan model regresi linear

berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square (OLS)* dari tahun 2006 – 2011.

Muhammad Fariz Alfarizi (2016), dalam penelitiannya menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan, Industri Besar Sedang, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. Dari penelitian ini diperoleh variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, Jumlah wisatawan berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak daerah, Jumlah Industri berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak daerah dan, PDRB berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dari tahun 1999-2015.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (1992) pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dalam kepentingan masyarakat. Namun, individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilannya negara.

Dalam perkembangannya untuk menyesuaikan pajak dengan iklim dan Kondisi perekonomian negara, pemerintah melakukan reformasi terhadap perpajakan baik atas pajak pusat maupun pajak daerah. Reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem perpajakan yang ada yang tidak atau kurang sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik (Sutrisno, 1998). Salah satu tujuan reformasi perpajakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan untuk mengurangi defisit APBN, disamping untuk menciptakan suatu sistem pajak yang Lebih sederhana, lebih meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk Meningkatkan penerimaan negara. Mengenai pajak yang baik, jika memenuhi prinsip-prinsip tertentu seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith (Suandy, 2008).

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pemungutan pajak, dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Pungutan pajak mengurangi penghasilan masyarakat atau individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat.

Definisi pajak dikemukakan oleh Judisseno (1997) sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi pajak tersebut di atas, jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional dan kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.

2.2.2 Jenis-Jenis pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi Tiga golongan, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut Lembaga pemungutannya (Riadi, 2012)

1). Menurut golongannya, terdiri dari:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: pajak penghasilan yang dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga Contoh: pajak pertambahan nilai yang terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2). Menurut sifatnya, terdiri dari:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya. Contoh: pajak penghasilan
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan.

3). Menurut lembaga pemungutannya, terdiri dari:

- a. Pajak negara atau pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Contoh: pajak daerah Tingkat I (provinsi) meliputi pajak kendaraan bermotor, balik Nama kendaraan bermotor.

Dari uraian di atas, bahwa ada tiga jenis-jenis pajak yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. Sedangkan jenis pajak yang Akan diteliti dalam penelitian ini adalah jenis pajak daerah yang termasuk dalam jenis pajak menurut lembaga pemungutannya.

2.2.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu (Mardiasmo, 2003 : 1-2) :

- a. Fungsi **Budgetair** yaitu pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.1 Pajak Daerah

2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut UU No.34 Tahun 2000 (Pasal 1, Ayat 6) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.2.2 Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri Pajak Daerah diantaranya dikemukakan oleh Joseph Riwo Kaho (1990 : 130) adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah adalah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.

- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.2.2.3 Jenis- Jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota

Sesuai dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis-jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah pajak atas semua pelayanan hotel. Sedangkan yang dimaksud Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran.

- b. Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sedangkan yang dimaksud Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau fasilitas minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

- c. Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan suatu barang, jasa, atau orang yang diletakkan di suatu tempat tertentu.

e. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 7 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor

ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan adalah hasil pencaharian perolehan atau sesuatu yang didapatkan yang sebelumnya belum ada. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berlaku, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembangunan daerahnya masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin daerah (IKR) yang diperoleh dari besarnya perubahan pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang Sama (Rudianto, 1997).

Rendahnya pendapatan asli daerah dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan (Sriyana, 1999). Walaupun seberapa besar peranan pendapatan asli daerah yang ideal juga masih sulit dijawab karena belum ada pedoman yang pasti untuk meningkatkan besarnya pendapatan asli daerah yang ideal bagi suatu daerah (Ismail, 2001).

Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kemandirian daerah terus berkembang. Berdasarkan Widayat (2000) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten atau Kota antara lain:

- a. Banyak sumber pendapatan Kabupaten atau Kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. BUMD belum banyak bisa memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lain.
- d. Adanya kebocoran-kebocoran.
- e. Biaya pungut yang masih tinggi.
- f. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
- g. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut Ismail (2000) rendahnya pendapatan asli daerah dalam struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber-sumber yang masuk dalam kategori pendapatan asli daerah umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah. Sumber potensial di daerah sudah diambil oleh pusat sebagai sumber penerimaan pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber yang kurang potensial, sebab yang lain belum intensifnya pelaksanaan pajak dan retribusi daerah.

Dari uraian di atas, ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Rendahnya pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh faktor banyak sumber pendapatan daerah yang digali oleh instansi yang lebih tinggi, BUMD belum banyak memberikan keuntungan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang membayar pajak maupun

retribusi, adanya kebocoran-kebocoran, biaya pungut masih tinggi, banyak peraturan daerah yang belum disempurnakan, dan sumber-sumber yang masuk dalam kategori pendapatan asli daerah umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah.

2.2.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sumber-sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana pajak daerah, penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah juga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga) merupakan penerimaan yang berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan prinsip pengelolaan. Berdasarkan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan asas *public service* dan sebagian keuntungan wajib disetorkan ke daerah.

d. Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber-Sumber Lain PAD yang Sah antara lain penerimaan- penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan-penerimaan APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Dana Perimbangan terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Daerah

Dana Bagi Hasil Daerah yang bersumber dari pajak antara lain : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Dana Bagi Hasil Daerah yang bersumber dari sumberdaya alam berasal dari : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbang kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis PAD dan Dana Perimbangan, yang terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/ lembaga asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah, badan/ lembaga dalam negeri atau perseorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang/ jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar.

b. Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan peristiwa luar biasa.

2.2.5 Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah Industri, terhadap Penerimaan Pajak Daerah

2.2.5.1 Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Boediono, 1994). Kenaikan harga dari satu/ dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Misalnya kenaikan harga menjelang hari raya atau yang terjadi sekali saja dan tidak berdampak terhadap kenaikan sebagian besar harga barang-barang lain tidak disebut sebagai inflasi. Di dalam teori kuantitas dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (demand), sehingga jumlah uang yang beredar dimasyarakat banyak. Kelebihan permintaan (demand) tersebut disebabkan oleh jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat jumlahnya sangat sedikit dan terjadi kelangkaan barang. Oleh karena jumlah barang yang sedikit dan terjadi kelangkaan barang tersebut, maka menyebabkan harga barang menjadi naik.

Inflasi mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian suatu negara. Inflasi Akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan. Peningkatan biaya produksi Akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan berkurang. Oleh karena berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut menjadi semakin menurun. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa

laju inflasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, dimana bila laju inflasi meningkat, maka penerimaan pajak daerah Akan menurun Menurut Kartasapoetra (2000),

2.2.5.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (*seculer stagnation*) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru Akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi karena penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidak selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi Akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Berdasarkan uraian diatas pertumbuhan jumlah penduduk Akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah.

2.2.5.3 Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu wilayah tertentu, dalam kurun waktu satu tahun. Ada dua jenis penghitungan PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku (*current year price*) dan atas dasar harga konstan (*base year price*) menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung. Sedangkan menurut harga konstan artinya nilai barang dan jasa yang dihasilkan, dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar.

Semakin besar PDRB berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2001).

Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat Akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka Akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pay*) berbagai pungutan, seperti pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.2.5.4. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri.

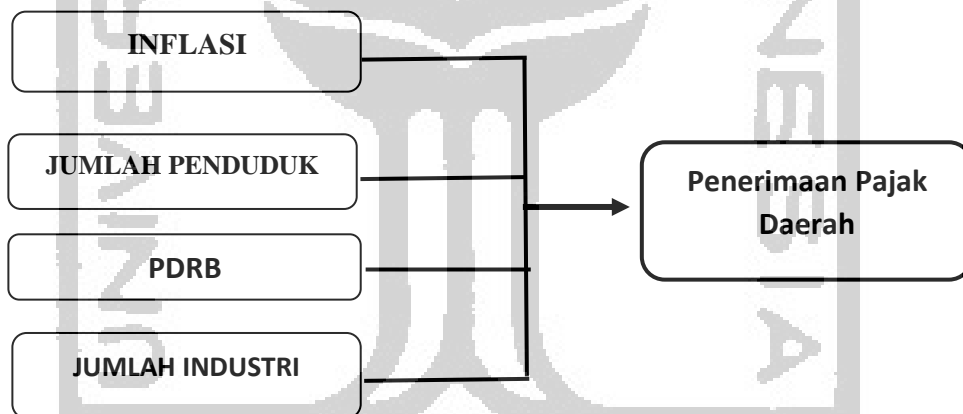
Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan menjelaskan kriteria pengelompokkan industri, yaitu Industri Kecil, Menengah, dan Besar. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal kekayaan bersih perusahaan sampai dengan Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil. Bila modal kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah. Bila modal kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp 500.000.000 tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar. Semakin banyak jumlah industri yang berkembang, pajak daerah yang dipungut Akan mningkat yaitu Pajak Reklame.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional variabel penelitian maka dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang perlu dibuktikan kebenarannya dan bersifat logis, jelas dan dapat di uji. Hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta

2. Diduga bahwa Tingkat Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta
3. Diduga bahwa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta
4. Diduga bahwa Jumlah Industri berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

3.1.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dan di

buat oleh pihak lain yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari suatu sampel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menentukan lokasi penelitian di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder selama lima belas tahun.

3.1.2 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dari penelitian ini bersumber dari:

1. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta tahun 2000-2015
2. Studi pustaka yaitu dengan mempelajari teori dari buku-buku dengan melakukan analisis yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak Daerah di Kota Yogyakarta. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

3.2.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat kategori yaitu:

1. Jumlah Industri di Kota Yogyakarta

Data Industri yang dipakai dalam penelitian ini adalah jumlah industri besar dan sedang yang ada di Yogyakarta.

2. Inflasi di Kota Yogyakarta.

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama (terus menerus), yang diukur dalam satuan persen.

3. PDRB atas harga konstan di Kota Yogyakarta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu wilayah tertentu, dalam kurunwaktu satu tahun. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah PDRB harga konstan tahun 2000.

4. Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta.

Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (*secular stagnation*) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk

justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi.

3.3 Metode Analisis

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan yaitu dengan model regresi linear berganda. Dalam regresi linear berganda ini, data yang digunakan ialah data *Time series* dengan jangka waktu dari tahun 2001-2015. Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis maka diperlukan alat analisis data dan mengetahui pengaruh yang di timbulkan oleh variable-variabel bebas (Inflasi, jumlah penduduk, PDRB, dan Jumlah Industri), teradap variabel terikat (Pajak Daerah), maka digunakan model ekonometrika. Model dasar yang digunakan dari persamaan estimasi adalah model OLS (*Ordinary Least Squares*). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel (PDRB, jumlah penduduk, jumlah industri besar dan sedang dan inflasi) terhadap penerimaan pajak Daerah, maka digunakan analisis regresi berganda sebagai analisis yang tepat dengan menggunakan uji spesifikasi MWD (Mackinnon, White, dan Davidson). Untuk menentukan bentuk suatu fungsi model empirik dimana perbandingan hasil regresi model log linier lebih baik dari pada model linier atau sebaliknya. Maka dari itu formulasi regrei linear berganda dari model linear ini adalah sebagai berikut :

$$Y=f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Keterangan :

Y = Pajak Daerah (dalam jutaan rupiah)

X1 =Inflasi (dalam satuan persen)

X2 =Jumlah Penduduk (dalam satuan jiwa)

X3 =Produk Domestik Regional Bruto (dalam jutaan rupiah)

X 4=Jumlah Industri (dalam satuan unit)

Adapun bentuk umum regresi berganda linier dalam perumusan model sebagai berikut $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$

Dimana e : variabel pengganggu/error

3.3.1 Uji MWD

Uji Mackinnon White and Davidson (MWD) bertujuan untuk menentukan apakah model yang Akan digunakan berbentuk linear atau log linear agar mendapatkan hasil regresi terbaik. Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut:

$$\text{Linier} \rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$\text{Log Linier} \rightarrow \text{Log}(Y) = \text{Log}\beta_0 + \beta_1 \text{Log} X_1 + \beta_2 \text{Log} X_2 + \beta_3 \text{Log} X_3 + \beta_4 \text{Log} X_4 + \beta_5 \text{Log} X_5 + e$$

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa:

1. H_0 : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linear)
2. H_1 : Y adalah fungsi log linier dari variabel independen X (model Log linear)

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ialah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis linier berganda dalam OLS dengan tujuan model regresi tidak bias atau model regresi BLUE. Proses analisis yang akan dilakukan terdiri dari pengujian variabel-variabel bebas secara individu, yaitu pengujian signifikan variabel secara individual, pengujian variabel-variabel penjelas (independen) secara bersama-sama serta perhitungan pengujian asumsi klasik dari regresi persamaan penerimaan pajak Daerah.

Penaksiran yang bersifat BLUE (*best linier unbiased estimator*). Yang diperoleh dari OLS (*Ordinary Least Square*) harus memenuhi seluruh asumsi – asumsi klasik, sebagai berikut :

3.3.3 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi kolerasi yang kuat diantara variabel-variabel – variabel bebas (X) yang diikutsertakan dalam pemberontakan model regresi linier. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai R^2 , F hitung serta t hitung. Namun berdasarkan uji F secara statistik signifikan berarti semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Asumsi model regresi klasik adalah bahwa tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel yang menjelaskan termasuk dalam model. Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang “sempurna” atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.

3.3.4 Uji Heteroskadasitas

Heteroskadasitas adalah dimana semua variabel pengganggu tidak mempunyai varian yang sama atau penyimpangan asumsi OLS dalam bentuk varian gangguan estimasi yang dihasilkan oleh asumsi OLS tidak bernilai konstan. Model regresi dengan heteroskadasitas mengandung konskuensi serius pada estimator metode OLS karena tidak lagi BLUE, maka untuk metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskadasitas pada peneliti ini adalah pengujian White, adapun langkah-langkah pengujiannya antara lain : $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_t$

1. Estimasi persamaan dan dapatkan residualnya
2. Lakukan regresi pada persamaan yang disebut dengan regresi *auxiliary*
 - d. Regresi *auxiliary* tanpa perkalian antar variabel independen (*no cross terms*) $\hat{e}_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{2i}^2 + \alpha_4 X_{2i}^2 + v_i$
 - e. Regresi *auxiliary* dengan perkalian antar variabel independen (*cross terms*)

$$\hat{\epsilon}_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{2i}^2 + \alpha_4 X_{2i}^2 + \alpha_4 X_{1i} X_{2i} + v_i$$

Dimana $\hat{\epsilon}_i^2$ merupakan residual kuadrat yang kita peroleh dari persamaan. Jika kita mempunyai lebih dari dua variabel independen dalam persamaan (*no cross terms*) maupun (*cross terms*) akan lebih banyak. Dari persamaan (*no cross terms*) dan (*cross terms*) kita dapatkan nilai koefisien determinasi (R^2).

3. Hipotesis nol dalam uji ini adalah tidak ada heterokedastitas. Uji White didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R^2 yang akan mengikuti distribusi Chi-squares dengan *degree of freedom* sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary. Nilai hitung statistic Chi-squares (x^3) dapat dicari dengan formula sebagai berikut : $nR^2 = X^2 df$
4. Jika nilai Chi-square hitung ($n.R^2$) lebih besar dari nilai X^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada menunjukkan heterokedastitas dan sebaliknya jika Chi-square hitung lebih kecil dari nilai X^2 kritis menunjukkan tidak adanya heterokedastitas. (Widarjono, 2013)

3.3.5 Uji Autokolerasi

Autokolerasi berarti adanya kolerasi antara anggota observasi satu dengan yang observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, Autokolerasi merupakan kolerasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi ini dapat dilakukan dengan metode Breusch Godfrey mengembangkan uji autokolerasi yang lebih umum dan dikenal uji Langrange Multiplier (LM). Untuk memahami uji LM, pada model regresi linier berganda :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3.$$

Dan dapat di uji melalui hipotesis nol tidak adanya autokolerasi dalam model sebagai berikut:

1. $H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$
2. $H_a : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots = \rho_p \neq 0$

Jika gagal menolak H_0 maka dikatakan tidak ada autokolerasi dalam model. Adapun prosedur dari uji LM adalah sebagai berikut :

1. Estimate persamaan dengan model OLS dan kita dapatkan residualnya.
2. Melakukan regresi residual dengan variabel bebas X_t

$$\hat{e}_t = \lambda_0 + \lambda_1 X_t + \rho_1 \hat{e}_{t-1} + \rho_2 \hat{e}_{t-2} + \dots + \rho_p \hat{e}_{t-p} + v_t$$

Kemudian dapatkan R^2 dari persamaan.

3. Jika sampel adalah besar, maka menurut Breusch dan Godfrey maka model dalam persamaan akan distribusi chi-squares dengan df sebanyak p yaitu panjang kelambanan residual dalam persamaan. Nilai hitung statistik chi-squares dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : $nR^2 \sim X_p^2$

Jika R^2 yang merupakan chi-squares (X^2) hitung lebih besar dari nilai kritis chi-squares (X^2) pada derajat tertentu (α), menolak hipotesis nol H_0 . Ini menunjukkan adanya autokolerasi. Penentuan ada atau tidaknya autokolerasi bisa juga dilihat dari nilai probabilitas chi-squares. Jika nilai probabilitas chi-squares lebih besar dari nilai α yang dipilih maka menolak H_0 yang artinya tidak ada autokolerasi. Sebaliknya jika nilai probabilitas chi-squares lebih kecil dari nilai α maka menerima H_0 yang artinya terdapat autokolerasi.

3.3.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) menjelaskan seberapa besar baiknya data digunakan untuk menghitung presentase total variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Atau dengan kata lain koefisien regresi menerangkan bagaimana garis regresi yang dibentuk sesuai dengan datanya (Agus Widarjono, 2013). Pengujian ini untuk mengetahui derajat berapa besar keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Besaran R^2 terletak antara 0 dan 1, jika $R^2 = 1$ berarti semua variasi dalam terikat (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (X) yang digunakan model regresi, sebesar 100%. Jika $R^2 = 0$ berarti tidak ada variasi dalam variabel (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (X). R^2 antara 0 - 1, model ini dikatakan lebih baik jika mendekati 1 (satu).

3.3.7 Uji Hipotesis (Uji-F)

Mengevaluasi untuk mengetahui variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan, maka pengujian dilakukan dengan uji F-test

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya variabel bebas tidak mempunyai variabel terikat

2. $H_a : \beta_i \neq 0$, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat

$$\text{Rumus F-hitung } \frac{R/(k-1)}{(1-R)/(n-k)}$$

Dimana :

R = koefisien determinasi

k = banyaknya variabel bebas

n = banyaknya sampel

Maka dengan derajat keyakinan tertentu :

1. Jika $F\text{-hitung} < F\text{ tabel}$, maka H_0 diterima yang berarti secara bersama-sama variabel bebas secara signifikan tidak terpengaruh variabel terikat.
2. Jika $F\text{-hitung} > F\text{ tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel bebas secara signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Pengujian terakhir yaitu mengukur kesetaraan hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas terhadap suatu himpunan data hasil pengamatan, yang serius disebut koefisien determinasi (R^2). Sehingga semakin tinggi R^2 maka semakin erat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.3.8 Uji Hipotesis (Uji-t)

Pengujian ini merupakan pengujian secara individu pada variabel bebas, yang dimaksudkan untuk mengetahui signifikan dari pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu. Langkahnya sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel bebas secara individu tidak mempengaruhi variabel terikat
2. $H_a : \beta_i > 0$, artinya variabel bebas secara individu mempengaruhi variabel terikat secara positif

$$t\text{-hitung} = \frac{\beta_i - 0}{SE(\beta_i)}$$

keterangan :

β_1 = koefisien regresi variabel ke 1

SE = Standar error dari variabel bebas ke-1

Dengan derajat keyakinan tertentu, maka jika :

1. $t\text{-hitung} < t\text{ tabel}$ atau $P\text{ value} > \alpha$ maka H_0 diterima H_a ditolak, artinya secara individu tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. $t\text{-hitung} > t\text{ tabel}$ atau $P\text{ value} < \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara individu terdapat pengaruh yang berarti antara variabel bebas terhadap variabel terikat.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan analisis dari data-data penelitian yang telah diolah menggunakan *E-Views*, diikuti dengan pembahasan dari hasil pengolahan data.

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan adalah *time series* dari tahun 2001 sampai 2015. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yang terdiri dari inflasi, pdrb, jumlah penduduk dan jumlah industri terhadap variabel dependen yaitu Pajak daerah dikota D.I Yogyakarta. Dalam penelitian ini, model di estimasi dengan menggunakan data *Time series*. Dengan periode pengamatan Lima belas tahun dari tahun 2001 sampai dengan 2015.

Tabel 4.1.
Data Pajak Daerah, inflasi, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, Dan PDRB, Kota Yogyakarta Tahun 2001 – 2015

Tahun	Pajak Daerah (juta rupiah)	Inflasi (%)	Jumlah penduduk (jiwa)	PDRB (juta rupiah)	Jumlah industri (unit)
2001	2.288.637	12,56	404.741	3.648.631	5.788
2002	3.051.759	12,01	412.196	3.812.425	5.813
2003	3.352.651	5,73	392.239	3.922.390	5.785
2004	4.058.198	6,95	398.004	3.980.040	5.814
2005	4.610.672	14,98	435.236	4.399.902	5.854
2006	4.399.715	10,4	443.112	4.574.051	5.848
2007	5.478.320	7,99	451.118	4.776.401	5.862
2008	6.245.277	9,88	456.915	5.021.148	5.950
2009	7.185.254	2,93	462.752	5.224.851	6.224
2010	7.825.458	7,38	387.086	5.505.942	6.535
2011	12.045.752	3,38	390.554	5.816.568	6.565
2012	20.832.921	4,31	394.012	6.151.679	6.565
2013	22.774.885	6,81	402.679	6.498.900	6.516

2014	25.399.630	1,76	400.467	6.640.393	5.133
2015	30.406.767	0,96	412.704	6.983.870	5.409

Sumber: BPS berbagai edisi

Variabel dependen yang digunakan adalah Pajak Daerah (dalam Juta rupiah), sedangkan variabel independen adalah X1 : Inflasi (%), X2 : jumlah penduduk (orang), X3 : PDRB (juta rupiah), X4 : jumlah industri (unit). Data yang digunakan sebagai bahan penelitian diperoleh dari dinas pajak daerah dan pengelola keuangan (DPDPK) dan kantor badan pusat statistika (BPS). Data jumlah penduduk, jumlah industri, PDRB harga konstan tahun 2000, dan data jumlah wisatawan diperoleh dari statistik Kota Yogyakarta dari berbagai edisi yang diterbitkan oleh BPS.

4.2. Pemilihan Model Regresi

Pada penelitian ini penentuan spesifikasi model yang digunakan apakah menggunakan model linier atau model log linier didasarkan pada uji MWD (MacKinnon, White, dan Davidson).

4.2.1. Model Linear

Tabel 4.2
Hasil Estimasi Uji MWD Model Linear

Dependent Variable: PJK
Method: Least Squares
Date: 11/30/18 Time: 03:37
Sample: 2001 2015
Included observations: 15

Variable	Coefficien	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13335243		17992930	0.741138	0.4775
INFLASI	86035.71		241899.0	0.355668	0.7303
PENDUDUK	-51.80024		28.42934	-1.822070	0.1018
PDRB	8.739224		0.960396	9.099604	0.0000
INDUSTRI	-4493.438		1666.104	-2.696973	0.0245
Z1	-3892618.		2517860.	-1.546003	0.1565
R-squared	0.954073		Mean dependent var	10663726	

Adjusted R-squared	0.928559	S.D. dependent var	9360060.
S.E. of regression	2501807.	Akaike info criterion	32.59210
Sum squared resid	5.63E+13	Schwarz criterion	32.87532
Log likelihood	-238.4407	Hannan-Quinn criter.	32.58908
F-statistic	37.39293	Durbin-Watson stat	1.644533
Prob(F-statistic)	0.000009		

Hasil olah data *E-Views 9*

Berdasarkan dari hasil regresi tersebut, Nilai probabilitas untuk Z1 adalah sebesar 0,1565> pada taraf α 5% maka menolak H_0 atau menerima H_a . Dengan demikian maka Z1 tidak signifikan secara statistik melalui uji t, pada model regresi linier, artinya model linear bias digunakan dalam mengestimasi persamaan regresi.

4.2.2 Model Log Linear

Tabel 4.3
Hasil Estimasi Uji MWD Model Log Linear

Dependent Variable: LOG(PJK)
Method: Least Squares
Date: 11/30/18 Time: 03:35
Sample: 2001 2015
Included observations: 15

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18.07508	12.16802	-1.485458	0.1716
LOG(INFLASI)	0.068579	0.118323	0.579595	0.5764
LOG(PENDUDUK)	-1.746340	0.734434	-2.377803	0.0414
LOG(PDRB)	4.115707	0.438679	9.382054	0.0000
LOG(INDUSTRI)	-0.816241	0.721414	-1.131445	0.2871
Z2	8.00E-08	5.86E-08	1.364979	0.2054
R-squared	0.976988	Mean dependent var	15.84394	
Adjusted R-squared	0.964204	S.D. dependent var	0.838640	
S.E. of regression	0.158669	Akaike info criterion	0.554816	
Sum squared resid	0.226583	Schwarz criterion	0.271596	
Log likelihood	10.16112	Hannan-Quinn criter.	0.557833	
F-statistic	76.42109	Durbin-Watson stat	1.515554	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil olah data *E-Views 9*

Berdasarkan dari hasil regresi tersebut, Nilai probabilitas untuk Z1 adalah sebesar $0,2054 >$ pada taraf α 5% maka menolak H_0 atau menerima H_a . Dengan demikian maka Z1 tidak signifikan secara statistik melalui uji t, pada model regresi log linier, artinya model linear bias digunakan dalam mengestimasi persamaan regresi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model linier karena dilihat dari nilai R2 model linier yaitu 0.976988 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai R2 model log linier yaitu 0.954073

Tabel 4.4
Hasil Estimasi Linear Berganda Model Linear

Dependent Variable: PJK
Method: Least Squares
Date: 11/30/18 Time: 03:59
Sample: 2001 2015
Included observations: 15

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26074866	17070652	1.527467	0.1576
INFLASI	113316.1	257477.7	0.440100	0.6692
PENDUDUK	-66.21801	28.66217	-2.310293	0.0435
PDRB	8.207733	0.957060	8.575989	0.0000
INDUSTRI	-5148.277	1719.720	-2.993672	0.0135
R-squared	0.941877	Mean dependent var	10663726	
Adjusted R-squared	0.918627	S.D. dependent var	9360060.	
S.E. of regression	2670041.	Akaike info criterion	32.69429	
Sum squared resid	7.13E+13	Schwarz criterion	32.93030	
Log likelihood	-240.2072	Hannan-Quinn criter.	32.69177	
F-statistic	40.51197	Durbin-Watson stat	1.846787	
Prob(F-statistic)	0.000004			

Hasil olah data *E-Views 9*

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain. Salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan residual adalah tidak adanya hubungan residual satu dengan residual yang lain. Apabila didalam model ada autokorelasi maka estimator yang kita dapatkan akan mempunyai karakteristik linier, tidak bias dan estimator metode kuadran terkecil tidak mempunyai varian yang minimum sehingga menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak lagi bisa dipercaya. Selanjutnya interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada uji-t maupun uji-F tidak bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.563942	Prob. F(2,8)	0.1379
Obs*R-squared	5.859151	Prob. Chi-Square(2)	0.0534

4.3.2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel independen didalam regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model dengan cara menguji nilai centered VIF antar variabel independen. Sebagai aturan main yang kasar (*rule of thumb*), jika nilai centered VIF cukup tinggi diatas 10 maka diduga dalam model

tersebut terdapat multikolinieritas, sebaliknya jika nilai centered VIF dibawah 10 maka diduga dalam model tersebut tidak terdapat multikolinieritas.

Tabel 4.6
Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.262308	-0.724888	0.000557
X2	0.262308	1.000000	-0.171073	-0.162024
X3	-0.724888	-0.171073	1.000000	0.116602
X4	0.000557	-0.162024	0.116602	1.000000

Pada tabel 4.6. dapat dilihat bahwa semua variabel tidak mengandung multikolinieritas

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dalam model OLS adalah varian dari residual yang konstan atau homoskedastisitas. Apabila residual mempunyai varian yang tidak konstan (heteroskedastisitas) maka estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang BLUE (*best linear unbiased estimator*) tetapi hanya *Linier Unbiased Estimator*. Konsekuensinya apabila estimator tidak mempunyai varian yang minimum maka perhitungan standar error tidak bisa dipercaya kebenarannya dan interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil

regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas maka peneliti menggunakan metode *White*.

Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	3.733637	Prob. F(4,10)	0.0414
Obs*R-squared	8.984250	Prob. Chi-Square(4)	0.0615
Scaled explained SS	3.743507	Prob. Chi-Square(4)	0.4418

Sumber : Hasil olah data *E-Views 9*

Pada tabel 4.7. P-Value Obs*R-squared = 8.984250 dan nilai probabilitasnya adalah 0.0615, dimana $0.0615 > 0.05$ yang berarti tidak signifikan maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.4. Uji Statistik

4.4.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kebaikan garis regresi atau seberapa besar persentase variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$. Semakin mendekati 1 maka semakin baik garis regresi mampu menjelaskan data aktualnya, sedangkan semakin mendekati 0 maka garis regresi semakin kurang baik. Analisis yang digunakan dengan menggunakan *E-Views 9* menghasilkan nilai R^2 sebesar 0.941877 menandakan bahwa variasi dari pajak daerah (Y) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel independen yaitu inflasi (X1), jumlah penduduk (X2), PDRB (X3), dan Jumlah industri (X4) sebesar 94.18%, sedangkan sisanya sebesar 5.72% dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel-variabel lain diluar model.

4.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.8

Hasil Uji F

Prob (F-Statistic)	Keterangan	Hipotesis
0.000000	Signifikan	Hipotesis Diterima

Sumber : Hasil olah data *E-Views 9*

Dalam Uji F digunakan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien regresi juga signifikan dalam menentukan nilai variabel dependen, maka diperlukan juga pengujian secara serentak yang menggunakan uji F. Dimana uji F merupakan pengujian terhadap variabel independen secara bersama-sama. Dilihat dari hasil estimasi regresi linier berganda nilai f-statistik atau probabilitas f-statistik sebesar 0.000000 pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak. Artinya Variabel Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB dan Jumlah industri, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah di Yogyakarta Tahun 2001-2015.

4.4.3. Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ artinya tidak berpengaruh terhadap Pajak Daerah

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ artinya berpengaruh terhadap Pajak Daerah

Dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas t-statistik $> 0,05$, maka H_0 diterima, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan dan

apabila nilai probabilitas t-statistik $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen

Tabel 4.9

Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26074866	17070652	1.527467	0.1576
INFLASI	113316.1	257477.7	0.440100	0.6692
PENDUDUK	-66.21801	28.66217	-2.310293	0.0435
PDRB	8.207733	0.957060	8.575989	0.0000
INDUSTRI	-5148.277	1719.720	-2.993672	0.0135

Sumber : Hasil olah data *E-Views 9*

Berdasarkan hasil uji t diatas, maka :

1. Uji t-statistik Variabel Inflasi (X1)

Variabel Inflasi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.6692 lebih besar dari taraf $\alpha = 5\%$, maka artinya menerima H_0 . Variabel Inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Pajak Daerah Yogyakarta

2. Uji t-statistik Variabel Jumlah Penduduk (X2)

Variabel Jumlah Penduduk menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0435 lebih kecil dari taraf $\alpha = 5\%$, menolak H_0 yang artinya berpengaruh signifikan. Variabel ini berpengaruh terhadap Pajak Daerah Yogyakarta.

3. Uji t-statistik Variabel PDRB (X3)

Variabel PDRB memiliki tingkat probabilitas 0.0000 yang lebih kecil dari taraf $\alpha = 5\%$, maka artinya secara perbandingan tingkat signifikansi marginal (marginal signifikan level), menolak H_0 . Variabel Tenaga Kerja berpengaruh secara positif sesuai hipotesis terhadap Pajak Daerah Yogyakarta.

4. Uji t-statistik Variabel Jumlah Industri (X4)

Variabel Jumlah Industri menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0135 lebih kecil dari taraf $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak, artinya Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pajak Daerah Yogyakarta

4.5. Analisis Ekonomi

4.5.1. Analisis Pengaruh Variabel Inflasi Terhadap Pajak Daerah Yogyakarta

Hasil penelitian menemukan bahwa Inflasi terbukti tidak berpengaruh terhadap pajak daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0.6692 lebih besar dari 0.05 (taraf α). Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah Yogyakarta. Dari hasil regresi Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pajak Daerah di Kota Yogyakarta dikarenakan inefektifitas dalam rangka pemungutan dan pendapatan pajak daerah itu sendiri. Dalam hal ini inflasi di hitung dari total prosentase kenaikan harga barang-barang homogen secara terus menerus dalam sebuah daerah.

4.5.2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta. Uji t dengan dilihat nilai probabilitas 0.0422 lebih kecil dari 5% maka menunjukkan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai koefisien jumlah

penduduk adalah sebesar -66.21801, hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 orang, akan menyebabkan penerimaan pajak turun sebesar -66,21801 juta rupiah. Karna bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap kenaikan jumlah angkatan kerja, sementara lapangan pekerjaan tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang begitu banyak, sehingga angkatan kerja yang terus bertambah tidak mendapatkan pekerjaan. pengangguran yang bertambah atau masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tidak bisa membayar pajak sebagai mana mestinya.

4.4.3. PDRB

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta. Uji t dengan dilihat nilai probabilitas 0.0000 lebih kecil dari 5% maka menunjukkan PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. nilai koefisien PDRB adalah sebesar 8,20773, hal ini menunjukkan kenaikan PDRB sebesar 1 juta rupiah, akan menyebabkan penerimaan pajak naik sebesar 8,20773 juta rupiah. Dan ini dapat di lihat dari perhitungan PDRB melalui pendekatan pendapatan hasil bruto dari total output yang di hasilkan dalam sebuah daerah dalam hal ini pendapatan Yogyakarta terus naik seiring dengan jumlah barang produksi dan tingkat konsumsi.

4.4.4. Jumlah Industri

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan jumlah industri berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta. Uji t dengan dilihat nilai probabilitas 0.00135 lebih kecil dari 5% maka menunjukkan jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai koefisien jumlah industri adalah sebesar -5,148277, hal ini menunjukkan kenaikan jumlah industri sebesar 1 unit, akan menyebabkan penerimaan pajak turun sebesar -5,148277 juta rupiah. Hal itu dikarenakan

industry yang berkembang saat ini merupakan industri kreatif di bidang teknologi yang mengutamakan basis online dalam setiap aktivitas pemasaran. Kendala yang terjadi saat ini di mana pemerintah sebagai regulator belum maksimal dalam menetapkan pajak terhadap setiap pelaku industri online.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari variabel inflasi, jumlah penduduk, PDRB dan jumlah industri terhadap pajak daerah di Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

Pajak daerah Yogyakarta di pengaruhi oleh variabel seperti Inflasi, jumlah penduduk, PDRB dan Jumlah Industri

1. Dari hasil analisis diperoleh inflasi tidak berpengaruh terhadap Pajak Daerah di Yogyakarta. dikarenakan inefektifitas dalam rangka pemungutan dan pendapatan pajak daerah itu sendiri. Dalam hal ini inflasi di hitung dari total prosentase kenaikan harga barang-barang homogen secara terus menerus dalam sebuah daerah
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variabel jumlah penduduk menunjukkan positi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta. Dengan nilai probabilitas 0.0422 lebih kecil dari 5% dan Nilai koefisien jumlah penduduk adalah sebesar -66.21801
3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta. Dan ini dapat di lihat dari

perhitungan PDRB melalui pendekatan pendapatan hasil bruto dari total output yang dihasilkan dalam sebuah daerah dalam hal ini pendapatan Jogja terus naik seiring dengan jumlah barang produksi dan tingkat konsumsi, sehingga ini akan menyebabkan kenaikan pajak.

4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan jumlah industri berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta. Dengan nilai probabilitas 0.00135 lebih kecil dari 5% dan Nilai koefisien jumlah industri adalah sebesar -5,148277

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisa data, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam hal ini pemerintah harus menjaga daya saing dan tingkat produktifitas kinerja dalam sebuah daerah guna menekan inflasi tersebut, juga harus membaca akan tingkat konsumsi yang fluktuatif sehingga dapat menekan kebijakan-kebijakan dalam rangka menangani dan menekan angka inflasi tersebut.
2. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, namun dengan nilai koefisien negatif di sini diharapkan buat pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar besarnya agar bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada.
3. PDRB Perkapita merupakan tolak ukur untuk menunjukkan & menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan PDRB Kota Yogyakarta terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini merupakan kabar baik bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Tentunya apabila

kesejahteraan masyarakat semakin baik maka akan menimbulkan potensi pasar, sehingga menarik minat konsumen dan investor untuk mempromosikan produk atau jasanya di daerah tersebut, maka kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta harus terus selalu di pertahankan, hanya saja memerlukan regulasi yang menguatkan produk lokal sehingga para penjual dan pedagang kecil juga turut serta dalam hal tersebut.

4. Jumlah industri secara keseluruhan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, dengan sisi positif yaitu dapat membantu pemerintah mengatasi masalah pengangguran akibat terbukanya lapangan pekerjaan. Tetapi satu sisi lain adanya faktor yang mempengaruhi jumlah industri tersebut membuat penerimaan pajak daerah bisa menurun dan bisa jadi dapat menghambat pertumbuhan jumlah industri itu sendiri. Salah satunya seperti industri online maka di harapkan buat pemerintah sebagai regulator untuk memaksimalkan dalam menetapkan pajak terhadap setiap pelaku industri online

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Muhammad. 2016. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta (Tahun 1999-2015)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Arge, 2017. “Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- DKI Jakarta Dalam Angka, BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hertanto. I dan Sriyana.J. 2011. “Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Kota”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*. Volume 12, Nomor 1, hlm.76-89.
- Istianto, Donna Dwi. 2010. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang (Tahun 2000-2009)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Liberty, Setia Neo. 2013. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Jember.
- Nurrohman, Alfian. 2010. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007)”, *Skripsi*,
Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.

Nurmayasari, Dini. 2010. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang”, *Skripsi*, Fakultas
Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Romikariyem. 2005. “Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negri Solo.

Yudisyus, opissen. 2014. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas
Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



LAMPIRAN



LAMPIRAN I

Tahun	Pajak Daerah (juta rupiah)	Inflasi (%)	Jumlah Penduduk (orang)	PDRB (juta rupiah)	Jumlah Industri (unit)
2001	2.288.637	12,56	404.741	3.648.631	5.788
2002	3.051.759	12,01	412.196	3.812.425	5.813
2003	3.352.651	5,73	392.239	3.922.390	5.785
2004	4.058.198	6,95	398.004	3.980.040	5.814
2005	4.610.672	14,98	435.236	4.399.902	5.854
2006	4.399.715	10,4	443.112	4.574.051	5.848
2007	5.478.320	7,99	451.118	4.776.401	5.862
2008	6.245.277	9,88	456.915	5.021.148	5.950
2009	7.185.254	2,93	462.752	5.224.851	6.224
2010	7.825.458	7,38	387.086	5.505.942	6.535
2011	12.045.752	3,38	390.554	5.816.568	6.565
2012	20.832.921	4,31	394.012	6.151.679	6.565
2013	22.774.885	6,81	402.679	6.498.900	6.516
2014	25.399.630	1,76	400.467	6.640.393	5.133
2015	30.406.767	0,96	412.704	6.983.870	5.409

Sumber: BPS (berbagai edisi)

Keterangan:

- Y = Pajak Daerah
- X1 = Inflasi (%)
- X2 = Jumlah Penduduk (Orang)
- X3 = PDRB (Juta,Rupiah)

X4 = Jumlah Industri (Unit)

LAMPIRAN II

Uji MWD Linier

Dependent Variable: PJK
Method: Least Squares
Date: 11/30/18 Time: 03:37
Sample: 2001 2015
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13335243	17992930	0.741138	0.4775
INFLASI	86035.71	241899.0	0.355668	0.7303
PENDUDUK	-51.80024	28.42934	-1.822070	0.1018
PDRB	8.739224	0.960396	9.099604	0.0000
INDUSTRI	-4493.438	1666.104	-2.696973	0.0245
Z1	-3892618.	2517860.	-1.546003	0.1565

R-squared	0.954073	Mean dependent var	10663726
Adjusted R-squared	0.928559	S.D. dependent var	9360060.
S.E. of regression	2501807.	Akaike info criterion	32.59210
Sum squared resid	5.63E+13	Schwarz criterion	32.87532
Log likelihood	-238.4407	Hannan-Quinn criter.	32.58908
F-statistic	37.39293	Durbin-Watson stat	1.644533
Prob(F-statistic)	0.000009		

Hasil olah data E-Views 9

LAMPIRAN III

Hasil Regresi Model Log Linier

Dependent Variable: LOG(PJK)

Method: Least Squares

Date: 11/30/18 Time: 03:35

Sample: 2001 2015

Included observations: 15

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18.07508	12.16802	-1.485458	0.1716
LOG(INFLASI)	0.068579	0.118323	0.579595	0.5764
LOG(PENDUDUK)	-1.746340	0.734434	-2.377803	0.0414
LOG(PDRB)	4.115707	0.438679	9.382054	0.0000
LOG(INDUSTRI)	-0.816241	0.721414	-1.131445	0.2871
Z2	8.00E-08	5.86E-08	1.364979	0.2054
R-squared	0.976988	Mean dependent var	15.84394	
Adjusted R-squared	0.964204	S.D. dependent var	0.838640	
S.E. of regression	0.158669	Akaike info criterion	0.554816	
Sum squared resid	0.226583	Schwarz criterion	0.271596	
Log likelihood	10.16112	Hannan-Quinn criter.	0.557833	
F-statistic	76.42109	Durbin-Watson stat	1.515554	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil olah data *E-Views 9*

LAMPIRAN IV

Hasil Estimasi Linear Berganda Model Linear

Dependent Variable: PJK
Method: Least Squares
Date: 11/30/18 Time: 03:59
Sample: 2001 2015
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26074866	17070652	1.527467	0.1576
INFLASI	113316.1	257477.7	0.440100	0.6692
PENDUDUK	-66.21801	28.66217	-2.310293	0.0435
PDRB	8.207733	0.957060	8.575989	0.0000
INDUSTRI	-5148.277	1719.720	-2.993672	0.0135
R-squared	0.941877	Mean dependent var	10663726	
Adjusted R-squared	0.918627	S.D. dependent var	9360060.	
S.E. of regression	2670041.	Akaike info criterion	32.69429	
Sum squared resid	7.13E+13	Schwarz criterion	32.93030	
Log likelihood	-240.2072	Hannan-Quinn criter.	32.69177	
F-statistic	40.51197	Durbin-Watson stat	1.846787	
Prob(F-statistic)	0.000004			

Hasil olah data E-Views 9

LAMPIRAN V
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.563942	Prob. F(2,8)	0.1379
Obs*R-squared	5.859151	Prob. Chi-Square(2)	0,0534

LAMPIRAN VI
Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.262308	-0.724888	0.000557
X2	0.262308	1.000000	-0.171073	-0.162024
X3	-0.724888	-0.171073	1.000000	0.116602
X4	0.000557	-0.162024	0.116602	1.000000

LAMPIRAN VII
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	3.733637	Prob. F(4,10)	0.0414
Obs*R-squared	8.984250	Prob. Chi-Square(4)	0.0615
Scaled explained SS	3.743507	Prob. Chi-Square(4)	0.4418

Sumber : Hasil olah data *E-Views 9*

LAMPIRAN VIII

Hasil Uji F

Prob (F-Statistic)	Keterangan	Hipotesis
0.000000	Signifikan	Hipotesis Diterima

Sumber : Hasil olah data *E-Views 9*

LAMPIRAN IX

Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26074866	17070652	1.527467	0.1576
INFLASI	113316.1	257477.7	0.440100	0.6692
PENDUDUK	-66.21801	28.66217	-2.310293	0.0435
PDRB	8.207733	0.957060	8.575989	0.0000
INDUSTRI	-5148.277	1719.720	-2.993672	0.0135

Sumber : Hasil olah data *E-Views 9*